MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCLXXXV
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	42	
1.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | UPT INSTALASI FARMASI | INSTALASI FARMASI KAB. LUMAJANG
2.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS JATIROTO
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD PASIRIAN | BIDANG PELAYANAN | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD PASIRIAN | BIDANG PELAYANAN | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD PASIRIAN | BIDANG PELAYANAN | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD PASIRIAN | BIDANG PENUNJANG | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS PASIRIAN
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD PASIRIAN | BIDANG PELAYANAN | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TEMPEH
12.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
13.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
14.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
15.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS RANDUAGUNG
16.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			PUSKESMAS PASIRIAN
17.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS KUNIR
18.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | UPT LABORATORIUM KESEHATAN | LAB. KES DAERAH KAB. LUMAJANG
19.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
20.	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
21.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SENDURO
22.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS LABRUK KIDUL
23.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS KLAKAH
24.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS PASRUJAMBE
25.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
26.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS SENDURO
27.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS KLAKAH
28.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS KEDUNGJAJANG
29.	RADIOGRAFER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
30.	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WADIR UMUM DAN KEUANGAN
31.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD PASIRIAN | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNIT UMUM
32.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
33.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TEMPURSARI
34.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS PADANG
35.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS GUCIALIT
36.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PUSKESMAS TUNJUNG
37.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
38.	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			KEPERAWATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		65	
1.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 PLANOLOGI	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 POLITIK ISLAM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIAL ISLAM ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | BIDANG HORTIKULTURA
4.	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL	6	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH
5.	KURATOR	S-1 ARKEOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM ; S-1 SENI PERTUNJUKAN ; S-1 ILMU SEJARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | SEKSI CAGAR BUDAYA, SEJARAH DAN PERMUSEUMAN
6.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MATERIAL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 HUKUM ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV HUKUM ; D-IV TEKNIK MATERIAL ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK GEODESI	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG TEKNIS DAN KONTRUKSI
8.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG ; S-1 DESAIN INTERIOR ; S-1 TEKNIK FISIKA ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK FISIKA ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG ; S-1 DESAIN INTERIOR ; S-1 TEKNIK FISIKA ; D-IV TEKNIK FISIKA ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG TEKNIS DAN KONTRUKSI
10.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG BINA MARGA
11.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
12.	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ; D-IV MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI ; D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV REKAYASA ELEKTRO ; D-IV REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA	3	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KONSTRUKSI BANGUNAN RAWA ; D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERPIPAAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SUMBER DAYA TANAH DAN AIR ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TRANSPORTASI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR INTERIOR ; S-1 ARSITEKTUR LANSKAP ; S-1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 PENDIDIKAN REKAYASA ELEKTRO ; S-1 PENDIDIKAN REKAYASA ELEKTRONIKA ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL GAMBAR ARSITEKTUR ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA ELEKTRO ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA ; S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL REKAYASA ELEKTRONIKA ; S-1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 RANCANG KOTA ; S-1 REKAYASA ELEKTRO ; S-1 REKAYASA ELEKTRONIKA ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA LINGKUNGAN ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA SISTEM ENERGI ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU ; S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK ; S-1 SAINS LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SISTEM ENERGI ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK		
13.	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI NIAGA ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 DESAIN INTERIOR ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PLANOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
15.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PARIWISATA | BIDANG PEMASARAN KEPARIWISATAAN
16.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT
17.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; D-IV KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
18.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU	6	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | INSPEKTORAT DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN		
20.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III GIZI ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III MANAJEMEN TATA BOGA ; D-III PARIWISATA ; D-III PERHOTELAN ; D-III PERJALANAN WISATA ; D-III TATA BOGA ; D-III TATA HIDANG	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI | BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
21.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III FARMASI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III GIZI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
22.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 FARMASI ; S-1 FARMASI KLINIS ; S-1 GIZI ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 KEUANGAN ISLAM ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 LOGISTIK ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI ; S-1 PENDIDIKAN BISNIS ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ; S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
23.	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; D-IV PENYULUH PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN
24.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR
25.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 BIOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KIMIA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SOSIAL ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 KEDOKTERAN HEWAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	SMA IPA ; SMK TEKNIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS PERHUBUNGAN
27.	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
28.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ARSITEKTUR	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
29.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ARSITEKTUR	2	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
30.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
31.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT
32.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	7	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
33.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | RSUD DR HARYOTO | WADIR UMUM DAN KEUANGAN
34.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG | SEKRETARIAT DAERAH | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN